

RINGKASAN

QURATUL AINI 227410101011 **PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH TERHADAP PENENTUAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN BENER MERIAH (Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Dr Yusrizal, S.H., M.H)**

Lahirnya lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) didasari oleh Wewenang Pemerintah Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan Daerah Aceh. Majelis Pendidikan Daerah di Kabupaten Bener Meriah adalah suatu Lembaga independen dan bukan suatu unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRK, merupakan wadah untuk meningkatkan peran Pendidikan dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pelaksanaan Kewenangan terhadap penentuan kebijakan Daerah serta hambatan antara Majelis Pendidikan Daerah dengan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan kebijakan dalam Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris jenis penelitian kualitatif, penelitian ini bersifat Preskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bener Meriah tempatnya di Majelis pendidikan Daerah. Sumber pengumpulan data terdiri dari data primer dan data sekunder alat pengumpulan data observasi dan wawancara, hasil penelitian disusun secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan yang hendak diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya Pelaksanaan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah terhadap penentuan kebijakan yang terdiri dari 1). Pelaksanaan manajemen MPD dalam memberikan pelayanan pendidikan secara bertahap, lembaga MPD telah menjalankan manajemennya khususnya terkait dengan fungsinya sebagai badan pemikir, memberi pertimbangan sebagai pengontrol dan penilai dan sebagai badan mediator masyarakat dengan pemerintah. 2).Pelaksanaan kewenangan MPD dalam memberikan pelayanan pendidikan yaitu menilai penyelenggaraan Pendidikan pada jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan 3) Pelaksanaan kewenangan MPD memberikan rekomendasi terkait kepada Pemerintah terkait Pendidikan. Hambatan dalam Pelaksanaan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah yaitu kurangnya bantuan operasional dan akomodasi dalam MPD sehingga dalam hal ini dapat menghambat program-program kerja. Serta kurangnya sumber daya manusia yang korkompeten pada MPD yang menghambat produktivitas dalam mengembangkan kemajuan Pendidikan di Kabupaten Bener Meriah.

Disarankan dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah perlunya Pemerintah melakukan perubahan terhadap isi dari pada Qanun Kab Bener Meriah nomor 24 tahun 2006 dan perlunya MPD untuk berkaborasi antara peraturan Bupati Bener Meriah dengan Qanun Majelis Pendidikan Daerah.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Kewenangan, MPD, Kebijakan Pendidikan.

SUMMARY

QURATUL AINI 227410101011 EXERCISE OF THE AUTHORITY OF THE REGIONAL EDUCATION ASSEMBLY TO DETERMINE REGIONAL POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION IN BENER MERIAH DISTRICT (Dr. Mukhlis, S.H., M.H dan Dr Yusrizal, S.H., M.H)

The birth of the Regional Education Council (MPD) institution was based on the Authority of the Aceh Government as regulated in Aceh Qanun Number 03 of 2006 concerning the organizational structure and work procedures of the Aceh regional education council. The Regional Education Council in Bener Meriah Regency is an independent institution and not an implementing element of the Regional Government and DPRK, it is a forum for increasing the role of education in the development of Bener Meriah Regency. This research aims to analyze the implementation of authority to determine regional policies as well as the obstacles between the Regional Education Council and the Bener Meriah Regency Government in implementing policies in education in Bener Meriah Regency.

This research uses an empirical juridical method, qualitative research type, this research is prescriptive in nature with the research location in Bener Meriah Regency, the location is in the Regional Education Council. Data collection sources consist of primary data and secondary data, observation and interview data collection tools, research results are arranged systematically to obtain clarity on the problems to be researched.

Based on the research results, the implementation of the authority of the Bener Meriah district regional education council regarding policy determination consists of 1). The implementation of MPD management in providing educational services in stages, the MPD institution has carried out its management, especially related to its function as a think tank, providing considerations as a controller and assessor and as a mediating body between the community and the government. 2). Implementation of the MPD's authority in providing educational services, namely assessing the implementation of education in terms of pathways, types and levels of education. 3) of the MPD's authority to provide relevant recommendations to the Government regarding education. Obstacles in implementing the authority of the Regional Education Council are the lack of operational assistance and accommodation in the MPD so that in this case it can hamper work programs. As well as the lack of competent human resources in the MPD which hampers productivity in developing educational progress in Bener Meriah Regency.

It is recommended that in implementing the authority of the Bener Meriah Regency Regional Education Council, the need for the Government to make changes to the contents of the Bener Meriah Regency Qanun number 24 of 2006 and the need for the MPD to collaborate between the Bener Meriah Regent's regulations and the Regional Education Council Qanun

Keyword: Implementation, Authority, MPD, Education Polic